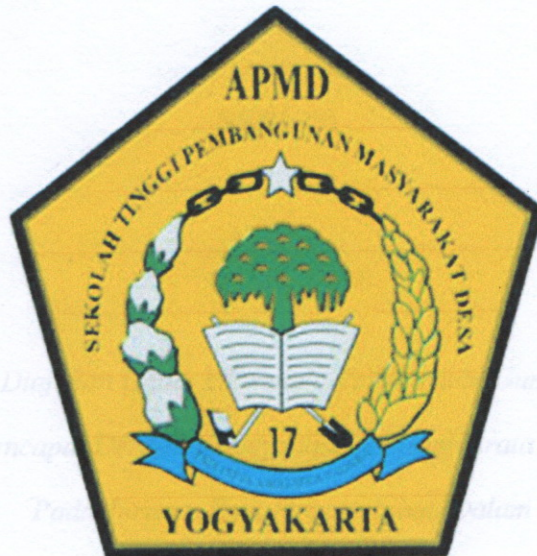


PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI PASIR PUTIH

*Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat*



Disusun Oleh :

YESAYA HISKIA KAMER

12520050



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2016

PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI PASIR PUTIH

*Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat*

Skripsi ini telah dipertahankan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 Mei 2015

Jam : 12.00 WIB

SKRIPSI

Tempat : Ruang Uji Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat

Desa "APMD"

Yogyakarta

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Mencapai Derajat Kesarjanaan Jenjang Strata Satu

Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Dalam

NAMA

Program Studi Pemerintahan

Drs. Subaryono, M.M

Ketua/Pengaji Pembimbing

Drs. Supardal, M.Si

Pengaji Sampung I

Dra. Herawati, MPA

Pengaji Sampung II

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 Mei 2016

Jam : 12.00 WIB

Tempat : Ruang Uji Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat

Desa "APMD"

Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Drs. Suharyanto, M.M

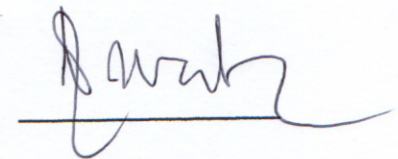
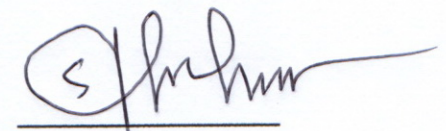
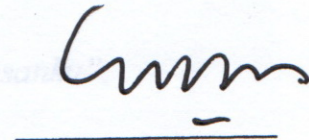
Ketua/Penguji/Pembimbing

Drs. Supardal, M.Si

Penguji Samping I

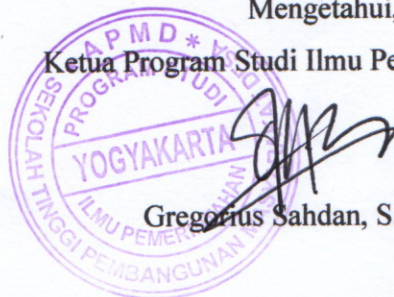
Dra. Herawati, MPA.

Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (S-1)



Gregorius Sahdan, S.IP, M.A.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini banyak sudah diperbincangkan tentang masalah dunia kepariwisataan, di mana orang mempunyai pandangan berbeda-beda, kalau boleh dikatakan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Lebih-lebih yang menyangkut adat-istiadat budaya dan lingkungan hidup kelompok masyarakat yang langsung terlibat dalam arus lalu-lintas dan kegiatan industri pariwisata.

Dilihat dari segi sejarah pertumbuhan, konstelasi serta keadaan dunia kepariwisataan dua puluh sampai dua puluh lima tahun lalu dan perkembangan serta kemungkinannya di masa-masa mendatang, industri pariwisata di Tanah Air kita ini kalau tadinya hanya baru merupakan suatu kemungkinan belaka, namun kini kiranya sudah dapat dikatakan tampil dalam suatu keadaan nyata (Nyoman S. Pendit: 1990, 27).

Kepariwisataan mempunyai peran penting untuk memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah dan pendapatan asli daerah serta bertujuan untuk memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya sehingga bisa mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri. Penyelenggaraan kepariwisataan mempunyai sifat yang luas dan menyangkut

kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga harus dilaksanakan secara terpadu serta terarah oleh Pemerintah, Badan Usaha, dan Masyarakat. Peran serta masyarakat dalam arti seluas-luasnya di dalam penyelenggaraan kepariwisataan ini memegang peran penting demi terwujudnya pemerataan kesempatan dan kesempatan berusaha. Oleh sebab itu, dengan sengaja difokuskan rentangan pada skala lokal karena pada saat ini masalah-masalah krusial dalam kaitannya dengan pembangunan industri pariwisata lebih banyak terjadi di tingkat lokal yaitu Provinsi dan Kabupaten (Sunyoto Usman: 2010, 54).

Salah satu upaya pemerintah untuk mendapatkan devisa dalam era pembangunan ini adalah dengan menggalang sektor pariwisata. Untuk itu perlu kesiapan dan pembenahan di berbagai bidang, termasuk pengelolaan dan pengembangannya. Pemerintah telah menetapkan daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia, namun kita yakin masih ada banyak lagi daerah kunjungan yang potensial. Untuk itu dibutuhkan keterampilan khusus dan kreativitas agar perencanaan dan kajian mengenai daerah tujuan wisata benar-benar mencapai sasaran. Secara sederhana diperkirakan bahwa yang disebut pengembangan adalah pengembangan sarana pariwisata. Sebenarnya pengembangan daerah tujuan wisata jauh lebih rumit dan memerlukan usaha dalam berbagai bidang yang menunjang arus wisatawan.

Masyarakat umum biasanya hanya mengenal berapa komponen dari industri pariwisata, misalnya industri penerbangan, industri perhotelan, bisnis hiburan. Masing-masing industri sering tidak bertindak sama sebagai suatu kelompok terintegrasi, dan sering memiliki pendapat yang bertentangan. Ada pula usaha yang melayani baik wisatawan maupu penduduk seperti Restoran, Rekreasi,

Perjalanan, dll. Jasa yang dibutuhkan oleh industri di bidang pariwisata adalah jasa pada orang-orang yang berkunjung di luar kawasan di mana ia tinggal dan bekerja.

Usaha-usaha pariwisata itu saling terkait dan saling berketergantungan. Soal apakah pariwisata merupakan industri atau tidak, bukan hal penting. Pariwisata sekarang, meliputi sektor swasta dan sektor pemerintah. Swasta pada dasarnya mengurus sarana pariwisata, dan pemerintah mengurus prasarananya. Dengan keadaan pariwisata yang *booming* dan memerlukan aktivitas pengembangan yang bertubi-tubi, maka peranan pemerintah makin besar dalam mengatur dan memproduksi dari produk dan layanan pariwisata. Fungsi pemerintah perlu dipertumbuhkan dalam pengembangan (Kusudianto Hadinoto: 1996, 10).

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah dan pendapatan asli daerah, menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, maka pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Berikut ini penjelasan mengenai pendapatan daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan wujud representasi kemampuan daerah dalam menggali potensi yang dimiliki. Semakin besar PAD yang dihasilkan, semakin mandiri daerah tersebut secara finansial dalam membiayai

pemerintahannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat PAD juga merupakan korelasi tolak ukur dari keberhasilan otonomi daerah.

Namun demikian, kewenangan daerah dalam menggali PAD diharapkan tidak membuat pemerintah daerah menjadi *profit oriented* (lebih berorientasi pada keuntungan semata) dan meninggalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Implementasi PAD harus berdasarkan peraturan daerah (Perda) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. (Icuk Rangga Bawono: 2012).

Dari penjelasan di atas, maka diharapkan kepada setiap pemerintah daerah mampu menjalankannya agar bisa dapat menambah pendapatan asli daerah, salah satunya melalui pengelolaan kepariwisataan. Karena dengan adanya sistem pengelolaan pariwisata yang baik tentu di setiap sektor akan memberikan masukan pendapatan bagi daerah tersebut melalui pajak dan retribusi bagi setiap pelaku usaha dan pengunjung yang datang.

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu daerah yang menjadikan pariwisata sebagai prioritas, karena memiliki potensi wisata yang unik dan jarang dimiliki oleh daerah lain. Potensi-potensi wisata di Provinsi ini yang sudah terkenal antara lain daya tarik wisata bawah laut di Kabupaten Raja Ampat, *Sunset* yang indah di Kabupaten Kaimana, seni dan kebudayaan yang unik dari masyarakat lokal di Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Papua Barat yang terdiri dari lebih 70 suku (dari ras Melanesia), flora dan fauna endemik, situs-situs

sejarah Perang Dunia II, dan juga situ-situ Pekabaran Injil di Kabupaten Manokwari.

Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat adalah salah satu contoh daerah yang mempunyai banyak atraksi wisata yang berpotensi namun belum berkembang secara maksimal. Berdasarkan informasi awal yang didapatkan dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, jumlah kunjungan wisatawan tertinggi terjadi pada bulan Desember-Februari. Hal ini terkait dengan perayaan HUT Pekabaran Injil (PI) di Tanah Papua pada setiap tanggal 5 Februari. HUT PI yang dirayakan di Pulau Mansinam sebagai tempat pendaratan pertama penganjil dari Jerman yaitu Carel Willem Ottow dan Johann Gottlob Geissler (Adolof Romsumbre dkk: 2011, 99).

Kabupaten Manokwari selain terkenal sebagai kota Injil, juga memiliki keindahan Alam yang sangat menarik hati para wisatawan yang datang. Beberapa keindahan alam dan juga objek wisata yang dijadikan sebagai tujuan wisata lokal maupun nasional bahkan internasional yaitu Objek Wisata Pegunungan Arfak, Objek Wisata Gunung Meja (Hutan wisata), Objek Wisata Religius Pulau Mansinam, Objek Wisata Telaga Kabori, Objek Wisata Telaga Wasti, Objek Wisata Pantai Sidei, Objek Wisata Pantai Maruni, Objek Wisata Pantai Amban, Objek Wisata Pemanggilan Ikan Bakaro, dan Objek Wisata Unggulan Pantai Pasir Putih. Objek-objek wisata ini sering dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi bersama keluarga dan juga teman-teman karena selain tempatnya yang indah juga memiliki keindahan alam yang masih alami.

Objek wisata unggulan Pantai Pasir Putih merupakan salah satu dari beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Manokwari. Objek wisata ini sering dipadati oleh warga masyarakat baik penduduk yang berdomisili di kota Manokwari tetapi juga dari Kabupaten tetangga seperti Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan. Setiap hari terlihat pantai ini ramai dipadati dengan para pengunjung baik orang dewasa maupun anak-anak. Namun pada hari sabtu dan minggu jumlah pengunjung lebih meningkat dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Karena Objek Wisata Pantai Pasir Putih ini merupakan salah satu objek wisata yang dapat dijangkau dengan mudah karena letaknya tidak jauh dari pusat ibukota Kabupaten Manokwari.

Untuk menempuh objek wisata ini jarak sekitar 20 kilometer dari pusat kota Manokwari. Selain jaraknya yang mudah dijangkau, biaya yang dikeluarkan untuk sampai ke lokasi objek wisata Pantai Pasir Putih ini sangat kecil. Ada dua jenis karcis yang harus dibeli oleh para pengunjung yakni retribusi masuk dan parkir kendaraan. Karcis untuk pengunjung sebesar Rp 2.000 per orang dan parkir kendaraan rodadua Rp 5.000/ Unit, sedangkan kendaraan roda empat sejenis minibus Rp 10.000/ Unit, bus dan truk 15.000/ Unit.

Ironisnya, signifikansi penambahan penduduk dan tingginya angka kunjungan ke Kabupaten Manokwari yang seharusnya menjadi modal dasar dan aset utama dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Manokwari, belum dapat diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata yang representatif dan dapat merepresentasikan citra kota Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat. Objek wisata Pantai Pasir Putih mejadi target utama pengembangan objek wisata yang nantinya akan beridentitas sebagai

kawasan wisata terpadu, karena selama ini, objek wisata pantai pasir putih merupakan objek wisata di kota Manokwari dengan tingkat pengunjung tertinggi, disertai keindahan pantai dan jaraknya yang dekat dengan pusat kota.

Usaha pengelolaan yang terdiri dari pembenahan fisik seperti pembangunan sarana prasarana dan fasilitas lainnya serta peningkatan kinerja menjadi tujuan utama dalam meningkatkan kualitas obyek wisata Pantai Pasir Putih untuk selalu menjadi lebih baik. Pengunjung yang datang di obyek wisata ini lebih besar kapasitasnya bila dibandingkan dengan obyek wisata lainnya. Pendapatan asli daerah Kabupaten Manokwari sebagian berasal dari hasil pendapatan obyek wisata ini. Ini semua karena upaya kerja keras dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengelola dan mengembangkan setiap obyek wisata di Kabupaten Manokwari. Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan penyeteroran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari mengenai retribusi masuk objek daerah tujuan wisata Pantai Pasir Putih, maka pendapatan yang diperoleh pada Tahun 2013 sebesar Rp 10.900.000.

Namun yang menjadi masalah dalam pengelolaan objek wisata pantai pasir putih adalah sarana prasarana atau fasilitas yang kurang diperhatikan oleh pemerintah seperti jalan yang masih berlubang, tempat parkir kendaraan yang masih sempit sehingga harus menggunakan bahu jalan untuk parkir motor dan mobil sehingga terkadang membuat kemacetan, toilet dan kamar mandi umum yang kurang bersih dan kurang terawat dengan baik sehingga beberapa yang atapnya sudah bolong, saluran air bersih yang belum disediakan dengan baik, sampah yang masih berserakan di sekitar pantai. Kemudian identitas dari petugas karcis yang kurang jelas karena pada saat bertugas sering tidak menggunakan

seragam dan sikap petugas karcis yang kurang ramah sehingga sering membuat jengkel dan kesal wisatawan. Selain itu juga, penghasilan retribusi belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Manokwari tidak banyak menganggarkan dan tuntutan pembayaran ganti rugi hak ulayat tanah di ojek wisata Pantai Pasir Putih oleh masyarakat pemilik setempat.

Oleh sebab itu, diharapkan dengan dikembangkannya Pantai Pasir Putih menjadi kawasan wisata terpadu, akan dapat menjawab kebutuhan rekreasi masyarakat, memberikan kontribusi positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat lokal, serta dapat mengangkat citra kota Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat yang menjadi barometer dan indikator pembangunan kepariwisataan bagi kota-kota lain di wilayah Provinsi Papua Barat.

Olehsebabitu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan obyek wisata Pantai Pasir Putih oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari. Maka, Tugas Akhir ini diberi judul “Pengelolaan ObyekWisata Pantai Pasir Putih”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

- 1 Bagaimana Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pasir Putih?
- 2 Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pasir Putih?

DAFTAR PUSTAKA

Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung; Pustaka Setia.

Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Bawono, Icuk Ranga dan Novelsyah, Mochamad. 2012. *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD dan SKPK*, Jakarta; Salemba Empat.

Darmayanti, Deni. 2013. *Panduan Lengkap Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi untuk semua program studi*, Yogyakarta; Araska.

Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencana Pengembangan Destinasi Pariwisata*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial, Konsep-konsep kunci*, Jakarta; Rajawali Pers.

Pendi S. Nyoman. 1990. *Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Pitana, I. Gde dan Diarta I. Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta; C.V Andi Offset.

Ronsumbre, Adolof dkk. 2011. *Tanah Papua di Garis Batas-Perspektif, Refleksi dan Tangtanga*, Malang; Setara Press.

Suryadi. 2011. *Libas Skripsi Dalam 30 Hari*, Yogyakarta; Diva Press.

Syafiie, Inu Kencana. 1997. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta; PT Rineka Cipta.

Usman, Suyanto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Yoeti, H. Oka A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta; PT Pradnya Paramita.

Referensi Lain :

Sari, Ayu Ardila. 2014. Skripsi, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Ketep Pass*. Yogyakarta: STPMD”APMD”

<http://fhenti137.blogspot.co.id/2014/05/definisi-dan-fungsi-manajemen-menurut.html> (download padatanggal 26 Januari 2016).

<http://imamutasim.blogspot.co.id/2013/11/wisata-pengertian-ciri-ciri-tujuan-bent.html>(download padatanggal 26 Januari 2016).